

BEBAS-AKTIF

— DI ERA —

RIVALITAS BESAR

MENJAGA KEMERDEKAAN, MEMPERLUAS RUANG STRATEGIS,
MEMBANGUN MASA DEPAN




PERDAMAIAN
DAN HUKUM INTERNASIONAL


KEMITRAAN
YANG SETARA


DIALOG DAN
KERJA SAMA


KETAHANAN DAN
KEMAKMURAN


KEPENTINGAN NASIONAL
DI ATAS SEGALANYA

Oleh
RUDY C TARUMINGKENG

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

4 April 2026

BEBAS-AKTIF DI ERA RIVALITAS BESAR

Abstrak

Politik luar negeri bebas-aktif merupakan salah satu fondasi paling khas dalam diplomasi Indonesia. Dalam pengertian klasik, bebas-aktif berarti Indonesia tidak mengikatkan diri pada satu blok kekuatan, tetapi tetap aktif membangun perdamaian, kerja sama, dan tatanan internasional yang lebih adil. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini tidak kehilangan relevansinya; justru ia memperoleh makna baru ketika sistem internasional bergerak menuju persaingan kekuatan besar yang lebih kompleks, ditandai oleh rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, menguatnya minilateralisme seperti AUKUS dan QUAD, konflik Rusia–Ukraina, perang di Gaza, guncangan energi, serta persaingan teknologi, rantai pasok, dan standar global. Dokumen resmi Kementerian Luar Negeri RI 2025–2029 secara eksplisit menempatkan rivalitas AS–RRT, kemunduran multilateralisme, dan penguatan forum minilateral sebagai bagian dari tantangan strategis yang harus dinavigasi Indonesia.

Makalah ini berargumen bahwa bebas-aktif di era rivalitas besar bukanlah sikap netral yang pasif, melainkan strategi otonomi yang kalkulatif. Politik ini memungkinkan Indonesia memperluas ruang gerak, menjaga kedaulatan keputusan, menghindari ketergantungan berlebihan pada satu kutub, serta memaksimalkan manfaat dari berbagai forum dan kemitraan sekaligus. Hal itu terlihat dalam pilihan Indonesia yang pada saat bersamaan memperkuat ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,

menjadi anggota penuh BRICS sejak Januari 2025, melanjutkan proses akses OECD, menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, serta memperluas kerja sama strategis dengan Jepang, Korea Selatan, dan mitra lainnya. Kombinasi ini menunjukkan bahwa bebas-aktif kini bekerja sebagai strategi diversifikasi diplomatik, ekonomi, dan geostrategis.

Namun demikian, makalah ini juga menunjukkan bahwa bebas-aktif menghadapi dilema baru. Di satu sisi, rivalitas besar memberi peluang bagi Indonesia untuk menjadi bridge-builder, middle power, dan mitra yang dibutuhkan banyak pihak. Di sisi lain, tekanan untuk “memilih pihak” semakin besar ketika isu-isu keamanan, Laut China Selatan, semikonduktor, energi, mineral kritis, dan konflik kawasan saling bertaut. Karena itu, relevansi bebas-aktif pada masa kini sangat bergantung pada kemampuannya bertransformasi dari doktrin normatif menjadi strategi operasional: berbasis kepentingan nasional, berakar pada hukum internasional, kuat dalam diplomasi ekonomi, dan konsisten dalam menjaga sentralitas ASEAN serta ruang otonomi Indonesia dalam tatanan global yang makin terfragmentasi. ([Kemlu](#))

Kata kunci: *bebas-aktif, politik luar negeri Indonesia, rivalitas besar, ASEAN, BRICS, OECD, Indo-Pasifik, otonomi strategis, middle power, diplomasi Indonesia*

Bebas-Aktif di Era Rivalitas Besar

Pendahuluan

Dalam sejarah diplomasi Indonesia, istilah bebas-aktif bukan sekadar slogan kebijakan, melainkan identitas strategis negara. Perpustakaan Kementerian Luar Negeri mendefinisikannya sebagai pendekatan diplomasi yang menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasional tanpa mengikuti salah satu blok kekuatan, sambil tetap aktif menjalin kerja sama bilateral dan multilateral serta berkontribusi bagi perdamaian dan pembangunan global. Definisi ini memperlihatkan dua unsur utama: kebebasan dalam menentukan posisi sendiri, dan keaktifan dalam membentuk lingkungan internasional, bukan sekadar bereaksi terhadapnya. ([Perpustakaan Kementerian Luar Negeri](#))

Masalahnya, lingkungan internasional kini jauh lebih rumit dibanding masa lahirnya doktrin tersebut. Renstra Kementerian Luar Negeri 2025–2029 menilai bahwa dunia beberapa tahun terakhir ditandai oleh kerawanan energi dan pangan, konflik Rusia–Ukraina dan Gaza, dampak rivalitas AS–RRT di ASEAN, serta kemunduran multilateralisme yang dibarengi penguatan minilateralisme melalui forum seperti AUKUS dan QUAD. Dalam suasana seperti ini, Indonesia tidak berhadapan dengan satu garis pembelahan ideologis seperti era Perang Dingin, melainkan dengan banyak lapisan persaingan sekaligus: militer, ekonomi, teknologi, maritim, energi, rantai pasok, dan narasi global.

Karena itu, pertanyaan penting bukan lagi apakah bebas-aktif masih relevan, tetapi bagaimana prinsip tersebut dioperasionalkan. Jika bebas-aktif dipahami hanya sebagai “tidak memihak”, maka ia berisiko dibaca sebagai sikap kabur, lamban, atau tidak tegas. Kemenlu sendiri mengakui bahwa prinsip bebas-aktif kadang dapat dianggap “tidak tegas” oleh sebagian konstituen domestik maupun pemangku kepentingan internasional. Tetapi pada saat yang sama, dokumen yang sama menegaskan bahwa konsistensi Indonesia pada prinsip tersebut justru menjadi modal kredibilitas sebagai *reliable partner* dan *bridge-builder*. Di sinilah tantangan akademik dan kebijakan muncul: bagaimana menjelaskan bahwa tidak memilih blok bukan berarti tidak memiliki posisi.

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa bebas-aktif di era rivalitas besar harus dipahami sebagai strategi otonomi yang adaptif. Ia bukan netralitas pasif, tetapi bentuk *strategic autonomy* Indonesia: bebas untuk menghindari subordinasi terhadap satu kekuatan, aktif untuk membentuk aturan, forum, dan kemitraan yang menguntungkan kepentingan nasional sekaligus stabilitas kawasan. Dengan kerangka itu, makalah ini akan membahas: pertama, landasan konseptual bebas-aktif; kedua, karakter rivalitas besar masa kini; ketiga, manifestasi praktis bebas-aktif dalam diplomasi Indonesia mutakhir; keempat, dilema dan risikonya; dan kelima, agenda strategis agar bebas-aktif tetap efektif sebagai doktrin dan praktik kebijakan luar negeri Indonesia. ([Perpustakaan Kementerian Luar Negeri](#))

Bebas-Aktif sebagai Doktrin dan Strategi

Secara normatif, bebas-aktif berakar pada mandat konstitusional Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun dalam dokumen strategis mutakhir Kemenlu, prinsip ini tidak dirumuskan hanya sebagai warisan sejarah, melainkan sebagai pendekatan yang tetap relevan di tengah “era baru kondisi global”. Renstra 2025–2029 menyatakan bahwa Indonesia terus menjaga komitmen menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, menghormati hukum internasional, dan berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran dunia. Dokumen itu juga menekankan bahwa diplomasi Indonesia dijalankan secara *well-measured, well-calculated, action-oriented*, dan *result-oriented*, sambil menjunjung nilai Konferensi Asia-Afrika, solidaritas Global South, dan penghormatan pada Piagam PBB serta hukum internasional.

Pernyataan ini penting karena menunjukkan evolusi makna bebas-aktif. Bebas-aktif tidak lagi cukup dibaca sebagai posisi etik semata, tetapi juga sebagai metode kebijakan yang terukur dan berorientasi hasil. Dengan kata lain, Indonesia tidak ingin bebas-aktif dipahami sebagai romantisme Bandung belaka. Ia hendak menegaskan bahwa warisan Bandung dan Gerakan Non-Blok memberi legitimasi moral, tetapi pelaksanaannya hari ini

harus bersifat operasional, pragmatis, dan relevan dengan tantangan konkret seperti energi, pangan, teknologi, dan stabilitas kawasan.

Di sinilah bebas-aktif bertemu dengan gagasan *middle power diplomacy*. Indonesia bukan kekuatan besar yang mampu memaksakan hasil secara unilateral, tetapi juga bukan negara kecil yang sekadar menyesuaikan diri pada tekanan eksternal. Posisi Indonesia berada di tengah: cukup besar secara demografi, ekonomi, wilayah, dan legitimasi historis untuk diperhitungkan, namun tetap memerlukan ruang manuver yang lentur. Renstra Kemenlu bahkan menilai Indonesia memiliki modalitas sebagai negara berkembang, negara kepulauan/maritim, demokrasi besar, dan negara dengan populasi Muslim terbesar, yang memungkinkannya menjadi representasi dan mitra bagi banyak kelompok negara. Karena itu, bebas-aktif sesungguhnya bekerja sebagai strategi untuk mengubah posisi “di tengah” menjadi sumber pengaruh, bukan sumber kelemahan.

Dalam perspektif ini, bebas-aktif berbeda dari netralitas klasik. Netralitas cenderung berbicara tentang menjauh dari konflik. Bebas-aktif justru menuntut keterlibatan aktif dalam mencegah konflik, menjaga hukum internasional, memperkuat forum regional, dan menciptakan jembatan komunikasi di antara pihak-pihak yang bersaing. Itulah sebabnya Kemenlu pada awal 2026 menekankan “diplomasi ketahanan” sebagai pilar fundamental politik luar negeri Indonesia dan menempatkan multilateralisme sebagai instrumen ketahanan serta perluasan ruang strategis Indonesia, bukan sebagai idealisme yang naif. ([Kemlu](#))

Era Rivalitas Besar: Dari Perang Dingin ke Kompetisi Multipolar

Rivalitas besar dewasa ini berbeda dari Perang Dingin lama. Jika pada masa lalu dunia relatif terbagi ke dalam dua blok yang cukup jelas, kini struktur persaingan lebih cair. Rivalitas utama memang banyak berpusat pada Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi dimensi persaingannya jauh lebih menyebar: perdagangan, investasi, semikonduktor, mineral kritis, konektivitas, Laut China Selatan, Taiwan, standar digital, hingga pengaruh dalam organisasi internasional. Renstra Kemenlu secara eksplisit

memasukkan rivalitas AS–RRT, konflik maritim dan perbatasan, rentannya *global supply chain* termasuk sektor energi dan pangan, serta perubahan kebijakan domestik negara lain sebagai bagian dari tantangan utama bagi diplomasi Indonesia ke depan.

Rivalitas ini memiliki dimensi kawasan yang sangat nyata. ASEAN, yang selama ini menjadi jangkar stabilitas Asia Tenggara, kini berada di tengah tekanan berlapis. Reuters melaporkan bahwa agenda ASEAN pada 2026 dibayangi oleh konflik Myanmar, sengketa Laut China Selatan, dan kebutuhan mempercepat pembahasan Code of Conduct dengan Tiongkok, sementara klaim maritim Tiongkok tumpang tindih dengan ZEE Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Dalam konteks ini, rivalitas besar tidak lagi berada “di luar” Asia Tenggara, tetapi masuk langsung ke jantung persoalan keamanan kawasan. ([Reuters](#))

Situasi Laut China Selatan memperlihatkan dengan jelas bagaimana kompetisi besar merembes ke wilayah kepentingan Indonesia. Pada 29 Maret 2026, Reuters melaporkan patroli laut, udara, dan penjaga pantai Tiongkok di sekitar Scarborough Shoal, hanya beberapa hari setelah dimulainya kembali dialog tingkat tinggi Manila–Beijing. Insiden itu menunjukkan bahwa diplomasi dan eskalasi dapat berjalan bersamaan; ketegangan tidak hilang hanya karena ada dialog. Bagi Indonesia, yang menekankan penyelesaian damai, penghormatan hukum laut, dan stabilitas maritim, dinamika seperti ini mempertegas pentingnya kebijakan yang tidak terjebak menjadi satelit salah satu pihak. ([Reuters](#))

Rivalitas besar juga memiliki wajah geoekonomi. Keterkaitan perdagangan Indonesia dengan dua kekuatan utama menunjukkan mengapa pilihan “memihak satu kutub” secara ekstrem akan sangat mahal. Data BPS menunjukkan bahwa pada Januari–November 2025 Tiongkok tetap menjadi pasar ekspor terbesar Indonesia dengan nilai US\$58,24 miliar atau 23,8% ekspor nonmigas, dan pada Januari 2026 Tiongkok juga mendominasi sumber impor Indonesia dengan nilai US\$7,91 miliar atau 37,31% dari total impor. Pada saat yang sama, USTR mencatat total

perdagangan barang AS–Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US\$45,8 miliar. Struktur ini menjelaskan bahwa dalam kenyataan ekonomi, Indonesia hidup di dalam jejaring yang saling bertumpang tindih, bukan di dalam sistem pilihan biner. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, era rivalitas besar seharusnya tidak dibaca hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai konteks yang membuat otonomi strategis menjadi kian penting. Negara yang mampu menjaga keseimbangan, memperluas opsi, dan menghindari ketergantungan tunggal akan memiliki posisi tawar lebih besar. Sebaliknya, negara yang terlalu cepat mengunci diri pada satu orbit kekuatan akan lebih mudah kehilangan fleksibilitas kebijakan. Di titik ini, bebas-aktif justru memperoleh relevansi baru: bukan sebagai warisan lama yang dipertahankan secara defensif, tetapi sebagai perangkat adaptif untuk menghadapi multipolaritas yang penuh friksi.

Manifestasi Bebas-Aktif dalam Diplomasi Indonesia Mutakhir

Manifestasi pertama bebas-aktif tampak pada pilihan Indonesia untuk tetap menempatkan ASEAN sebagai jangkar utama kawasan. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) menegaskan ASEAN Centrality sebagai prinsip dasar kerja sama Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin ASEAN sebagai platform dialog dan implementasi kerja sama. Dokumen itu secara gamblang menyatakan visi atas Indo-Pasifik sebagai kawasan dialog dan kerja sama, bukan rivalitas, dengan keterbukaan, inklusivitas, penghormatan pada kedaulatan, non-intervensi, dan hukum internasional sebagai prinsipnya. Dengan mendukung AOIP, Indonesia pada dasarnya mengusulkan model kawasan yang tidak didominasi logika blok, tetapi logika keterbukaan yang dikelola melalui sentralitas ASEAN.

Gagasan ini konsisten dengan posisi Indonesia pada awal 2026. Dalam rangkaian PPTM 2026, Kemenlu menekankan bahwa multilateralisme harus diperlakukan sebagai instrumen ketahanan dan perluasan ruang strategis Indonesia, sementara ASEAN perlu kembali pada tujuan awalnya sebagai ruang damai yang bebas dari unjuk kekuatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Indonesia, menjaga ASEAN bukan sekadar urusan simbolik,

melainkan bagian dari strategi untuk mencegah Asia Tenggara berubah menjadi arena proksi rivalitas besar. ([Kemlu](#))

Manifestasi kedua adalah strategi “multi-engagement” Indonesia yang terlihat paling jelas dalam kombinasi BRICS dan OECD. Brasil mengumumkan masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025, dan pemerintah Brasil menekankan bahwa Indonesia dipandang sejalan dengan agenda reformasi tata kelola global dan penguatan kerja sama Global South. Dokumen Renstra Kemenlu kemudian menyebut keanggotaan BRICS sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global, membahas kepentingan negara-negara berkembang, mendorong sistem multilateral yang lebih representatif, dan menjadikan Indonesia *bridge-builder* antara negara maju dan negara berkembang. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Pada saat yang sama, Indonesia tidak menjadikan BRICS sebagai pengganti jalur lain. OECD menyatakan bahwa Dewan OECD membuka diskusi akses dengan Indonesia pada 20 Februari 2024, menjadikannya negara kandidat akses pertama dari Asia Tenggara. Pada Juni 2025, Indonesia menyerahkan *Initial Memorandum* sebagai tonggak penting dalam proses akses. Secara strategis, langkah ini berarti Indonesia ingin mendekat pada standar, praktik terbaik, dan reformasi kelembagaan yang diasosiasikan dengan negara-negara maju, tanpa merasa bahwa langkah tersebut bertentangan dengan keterlibatannya di BRICS. Justru kombinasi keduanya menunjukkan corak bebas-aktif yang khas: Indonesia berusaha hadir di forum Global South dan forum standar global sekaligus. ([OECD](#))

Secara akademik, kombinasi BRICS–OECD ini penting karena membuktikan bahwa bebas-aktif bukan strategi penghindaran, melainkan strategi pemaksimalan ruang. Jika Indonesia hanya masuk BRICS, ia mungkin dibaca terlalu condong ke orbit revisionis Global South. Jika hanya mengejar OECD, ia bisa dibaca terlalu menyesuaikan diri pada tata kelola Barat. Dengan menjalani keduanya secara simultan, Indonesia mengirim pesan bahwa kebijakan luar negerinya tidak dikendalikan oleh logika kubu,

melainkan oleh pencarian manfaat, reformasi, dan ruang manuver yang lebih luas. Ini adalah bentuk hedging yang lebih canggih daripada sekadar “duduk di pagar”; Indonesia secara aktif masuk ke banyak ruang untuk mencegah satu ruang menjadi satu-satunya penentu masa depannya. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Manifestasi ketiga tampak pada pemeliharaan hubungan fungsional dengan kekuatan besar dan menengah sekaligus. Renstra Direktorat Asia Timur 2025–2029 menyebut bahwa pada 2024–2025 hubungan Indonesia dengan tiga mitra kunci Asia Timur—Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea—semakin solid melalui berbagai kesepakatan strategis di tingkat tinggi, sembari menekankan bahwa Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas kawasan dalam isu Laut China Selatan, Laut China Timur, Semenanjung Korea, rivalitas AS–RRT, dan RRT–Taiwan. Rumusan ini menunjukkan pola yang jelas: Indonesia tidak memutus relasi dengan salah satu pihak, tetapi mengelola banyak relasi sekaligus dalam kerangka stabilitas kawasan dan kepentingan nasional. ([Kemlu](#))

Contoh konkret terlihat dalam hubungan dengan Korea Selatan. Reuters melaporkan bahwa pada 1 April 2026, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyepakati penguatan dialog tingkat tinggi di bidang energi, kemitraan pada mineral strategis, pusat data, dan industri pertahanan, dengan nilai perdagangan bilateral 2025 mencapai US\$18,3 miliar. Kerja sama seperti ini penting karena memperlihatkan bagaimana bebas-aktif di era rivalitas besar juga dijalankan melalui diversifikasi mitra strategis di luar dua kutub utama. Indonesia tidak hanya menjaga hubungan dengan AS dan Tiongkok, tetapi juga memperluas jaringan dengan kekuatan menengah yang relevan bagi keamanan energi, teknologi, dan industri. ([Reuters](#))

Manifestasi keempat adalah konsistensi Indonesia pada isu-isu berbasis prinsip, terutama Palestina dan hukum internasional. Renstra Kemenlu menegaskan bahwa konsistensi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina berdasarkan *two-state solution* mendapat apresiasi dunia, dan

bahwa prinsip bebas-aktif tercermin pula dalam kemitraan dengan kawasan Pasifik di tengah kontestasi politik kekuatan global. Ini menunjukkan bahwa bebas-aktif Indonesia tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga normatif: Indonesia ingin tetap terbaca sebagai negara yang mempertahankan posisi pada isu dekolonisasi, kemanusiaan, dan hukum internasional, meskipun peta kekuatan dunia berubah.

Dilema dan Batas-Batas Bebas-Aktif

Meski demikian, bebas-aktif bukan tanpa biaya. Dilema pertama adalah dilema persepsi. Ketika tekanan internasional meningkat, kebijakan yang menolak dikotomi sering dibaca sebagai ambiguitas. Renstra Kemenlu sendiri menyebut bahwa prinsip bebas-aktif dapat dianggap “tidak tegas” pada isu-isu tertentu oleh audiens domestik maupun internasional. Dalam dunia yang kian terpolarisasi, ruang bagi posisi yang bernuansa memang menyempit; aktor internasional kerap menuntut sinyal yang lebih sederhana, sementara kebijakan Indonesia secara inheren justru menolak penyederhanaan semacam itu.

Dilema kedua adalah tekanan isu-spesifik. Menjaga jarak dari logika blok lebih mudah ketika isu yang diperdebatkan bersifat umum. Tetapi ia menjadi jauh lebih rumit ketika menyentuh perkara konkret seperti Laut China Selatan, teknologi 5G, ekspor nikel, semikonduktor, atau konflik di Selat Hormuz yang memengaruhi energi Asia. Sebagai contoh, Reuters mencatat bahwa pada awal 2026 ASEAN masih bergulat dengan Laut China Selatan dan Myanmar, sementara patroli Tiongkok di wilayah sengketa terus berlangsung. Dalam situasi seperti ini, Indonesia harus menemukan keseimbangan antara keengganan masuk ke blok dan kebutuhan mempertahankan posisi hukum yang jelas, terutama terkait kedaulatan, ZEE, dan penghormatan UNCLOS. ([Reuters](#))

Dilema ketiga adalah risiko overextension. Politik luar negeri yang hadir di terlalu banyak forum sekaligus dapat memperluas pengaruh, tetapi juga berisiko menyebarkan kapasitas diplomatik terlalu tipis. Menjadi aktif di ASEAN, BRICS, OECD, D-8, G20, IORA, MIKTA, dan forum-forum lain

memang memperbesar ruang strategis, tetapi setiap forum juga menuntut konsistensi posisi, sumber daya diplomatik, dan tindak lanjut kebijakan domestik. Karena itu, bebas-aktif akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada kehadiran simbolik tanpa kemampuan menerjemahkan kehadiran tersebut menjadi manfaat konkret. Penekanan Kemenlu pada diplomasi yang *action-oriented* dan *result-oriented* sesungguhnya merupakan pengakuan atas kebutuhan untuk mengubah keaktifan menjadi hasil nyata.

Dilema keempat adalah hubungan antara kebijakan luar negeri dan kapasitas domestik. Indonesia dapat bercita-cita menjadi *bridge-builder*, tetapi efektivitas peran itu sangat bergantung pada kekuatan ekonomi, kualitas institusi, ketahanan energi, dan konsistensi kebijakan dalam negeri. Proses akses OECD, misalnya, menuntut reformasi kebijakan dan kelembagaan; sementara keanggotaan BRICS membuka peluang, tetapi juga mengharuskan kemampuan Indonesia memanfaatkan platform seperti New Development Bank dan agenda kerja sama industrial. Dengan kata lain, bebas-aktif tidak dapat ditopang hanya oleh retorika; ia memerlukan fondasi domestik yang kuat agar ruang strategis eksternal dapat benar-benar dipakai.

Agenda Strategis: Membuat Bebas-Aktif Tetap Efektif

Agar bebas-aktif tetap relevan, Indonesia perlu menggeser fokus dari sekadar menjaga posisi ke membangun kapasitas. Agenda pertama adalah memperkuat ASEAN sebagai jangkar kawasan. Dalam konteks rivalitas besar, Indonesia tidak cukup hanya menyerukan sentralitas ASEAN; Indonesia harus terus mengisi ASEAN dengan prakarsa, mediasi, dan agenda substantif yang mencegah kawasan terseret ke logika blok. AOIP memberi kerangka normatif yang kuat, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemauan anggota ASEAN untuk menjadikannya instrumen nyata bagi kerja sama maritim, konektivitas, ekonomi, dan manajemen konflik.

Agenda kedua adalah memperdalam diplomasi ekonomi sebagai instrumen otonomi. Struktur perdagangan Indonesia menunjukkan

ketergantungan besar pada Tiongkok sebagai pasar dan sumber impor, sementara Amerika Serikat tetap menjadi mitra dagang penting dan pasar ekspor utama kedua. Dalam situasi seperti ini, strategi paling rasional bukan mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan lain, melainkan memperluas opsi: melalui OECD, BRICS, penyelesaian perundingan dengan Uni Eropa, penguatan RCEP, serta diversifikasi mitra industri dan investasi. Reuters pada Juni 2025 melaporkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa berupaya menuntaskan negosiasi penting perdagangan bebas, sebuah langkah yang sejalan dengan logika diversifikasi pasar dan standar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Agenda ketiga adalah menjadikan hukum internasional sebagai inti operasional bebas-aktif. Dalam era rivalitas besar, posisi yang paling mudah dipertahankan dan paling sulit disalahpahami ialah posisi yang berakar pada prinsip hukum yang konsisten: penghormatan kedaulatan, penyelesaian damai sengketa, UNCLOS, dan Piagam PBB. Posisi ini sejalan dengan AOIP dan dengan pernyataan Kemenlu bahwa Indonesia tetap menghormati hukum internasional. Dengan demikian, bebas-aktif bukan “bebas dari prinsip”, tetapi bebas untuk tidak tunduk pada blok justru karena berpegang pada prinsip-prinsip yang lebih umum dan lebih legitimate secara internasional.

Agenda keempat adalah memperkuat ketahanan domestik. Pada akhirnya, ruang strategis luar negeri akan menyempit jika Indonesia rapuh secara ekonomi, energi, atau teknologi. Itulah sebabnya diplomasi ketahanan yang disebut Menlu Sugiono pada awal 2026 harus dibaca secara serius: bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai jembatan antara politik luar negeri dan agenda pembangunan nasional. Indonesia yang lebih kuat dalam energi, mineral hilir, manufaktur, pangan, dan teknologi akan lebih mudah menjalankan bebas-aktif secara substantif, karena ketergantungannya pada tekanan eksternal akan berkurang. ([Kemlu](#))

Penutup

Bebas-aktif di era rivalitas besar tetap relevan, tetapi relevansinya tidak lagi otomatis. Ia hanya akan efektif bila dipahami sebagai strategi otonomi yang aktif, bukan sekadar penolakan untuk memilih kubu. Dalam dunia yang ditandai oleh rivalitas AS–Tiongkok, krisis energi, kompetisi standar, dan erosi multilateralisme, Indonesia memerlukan kebijakan luar negeri yang memberi ruang gerak seluas mungkin, tanpa kehilangan pijakan normatif. Dokumen resmi Kemenlu 2025–2029 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyadari kompleksitas ini: rivalitas besar, minilateralisme, disrupti rantai pasok, konflik maritim, dan tekanan geopolitik telah menjadi bagian permanen dari lingkungan strategis Indonesia.

Dalam praktik mutakhir, Indonesia telah menunjukkan bahwa bebas-aktif bukan mitos masa lalu. Keanggotaan BRICS, proses akses OECD, penguatan AOIP dan ASEAN Centrality, pemeliharaan hubungan dengan AS dan Tiongkok, serta perluasan kemitraan dengan kekuatan menengah seperti Korea Selatan menunjukkan pola diplomasi yang lentur namun terarah. Yang dikejar bukan keseimbangan mekanis, melainkan perluasan opsi, penguatan posisi tawar, dan perlindungan kepentingan nasional di tengah sistem internasional yang makin cair.

Dengan demikian, bebas-aktif pada masa kini paling tepat dipahami sebagai seni memelihara otonomi di tengah keterhubungan. Indonesia tidak mungkin mengisolasi diri dari rivalitas besar, tetapi juga tidak harus larut ke dalamnya. Tantangan ke depan adalah menjadikan bebas-aktif bukan hanya prinsip yang dibela, melainkan kapasitas yang dibangun: melalui diplomasi kawasan yang kuat, ekonomi yang lebih tangguh, kepatuhan pada hukum internasional, dan kemampuan membaca kapan Indonesia harus menjadi penyeimbang, kapan menjadi jembatan, dan kapan harus bicara tegas atas nama kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Di situlah bebas-aktif menemukan bentuknya yang paling modern dan paling strategis. ([Kemlu](#))

Glosarium

Bebas-aktif: prinsip politik luar negeri Indonesia yang menekankan kebebasan menentukan posisi sendiri tanpa terikat pada satu blok kekuatan, sambil tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dan kerja sama internasional. ([Perpustakaan Kementerian Luar Negeri](#))

Otonomi strategis: kemampuan negara menjaga ruang pengambilan keputusan sendiri di tengah tekanan eksternal dan keterkaitan global.

Middle power: negara yang bukan kekuatan besar, tetapi memiliki kapasitas diplomatik, ekonomi, dan legitimasi yang cukup untuk memengaruhi agenda regional atau global.

ASEAN Centrality: gagasan bahwa ASEAN harus menjadi pusat arsitektur kawasan Indo-Pasifik melalui mekanisme yang dipimpinnya sendiri.

AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific): dokumen ASEAN yang menekankan Indo-Pasifik sebagai kawasan dialog dan kerja sama, bukan rivalitas, dengan prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan penghormatan hukum internasional.

Bridge-builder: peran negara sebagai jembatan dialog dan kerja sama di antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan atau berkonflik.

Minilateralisme: kerja sama antar sejumlah kecil negara untuk tujuan tertentu, seperti AUKUS atau QUAD, yang sering muncul ketika forum multilateral dinilai kurang efektif.

BRICS: kelompok negara berkembang yang kini mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan anggota baru lainnya, termasuk Indonesia sejak Januari 2025. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

OECD accession: proses akses Indonesia untuk menjadi anggota OECD, yang dimulai setelah dibukanya diskusi akses pada Februari 2024 dan mencapai tonggak penting pada Juni 2025. ([OECD](#))

Hedging: strategi mengelola risiko dengan tetap membuka hubungan ke berbagai pihak sekaligus, sehingga negara tidak terlalu bergantung pada satu kekuatan.

Referensi (APA 7)

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN outlook on the Indo-Pacific*. ASEAN.

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Ekspor dan impor Indonesia Desember 2025 masing-masing tercatat USD 26,35 miliar dan USD 23,83 miliar*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026, January 5). *Indonesia's balance of trade continues to record a surplus*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026, April 2). *Monthly foreign trade statistical imports, January 2026*. BPS.

Brazilian Government. (2025, January 6). *Brazil announces Indonesia as full member of BRICS*. Government of Brazil.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Rencana strategis Kementerian Luar Negeri 2025–2029*. Kemlu RI.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Renstra Direktorat Asia Timur 2025–2029*. Kemlu RI.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026, January 13). *PPTM 2026: Diplomasi ketahanan Indonesia di tengah dunia yang bergejolak*. Kemlu RI.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026, January 13). *PPTM 2026: Indonesia serukan ASEAN kembali pada tujuan awal*. Kemlu RI.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026, January 13). *PPTM 2026: Multilateralisme sebagai instrumen ketahanan dan perluasan ruang strategis Indonesia*. Kemlu RI.

Perpustakaan Kementerian Luar Negeri. (2026). *Politik bebas aktif*. Kemlu RI.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025, June 3). *Indonesia reaches key milestones in OECD accession process*. OECD.

Reuters. (2025, June 7). *Indonesia expects to conclude free trade talks with EU by end of June*. Reuters.

Reuters. (2026, January 29). *Southeast Asian bloc faces challenges from Myanmar to South China Sea*. Reuters.

Reuters. (2026, March 28). *Manila, Beijing resume talks on South China Sea, energy security*. Reuters.

Reuters. (2026, March 29). *China conducts patrol around disputed South China Sea shoal*. Reuters.

Reuters. (2026, April 1). *South Korea and Indonesia discuss energy security, sign agreements on minerals and tech*. Reuters.

United States Trade Representative. (2026). *Indonesia*. USTR.

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[AP News](#)

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 4 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d09fba-17f0-839d-ac0a-924d9474c97d>